

**PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL DAN PERJANJIAN**

KREDIT

(Studi Kasus Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

ARDIAN AZHARI KURNIAWAN

C 100130035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

NASKAH PUBLIKASI

Naskah Publikasi Ini Disetujui Untuk Dipertahankan Di Hadapan

Dewan Penguji Skripsi

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

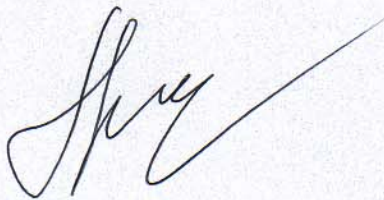
Oleh:

ARDIAN AZHARI KURNIAWAN

C.100.130.035

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nuswardhani', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Nuswardhani, S.H., S.U.)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL DAN
PERJANJIAN KREDIT**

(Studi Kasus Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt)

Yang ditulis oleh:

ARDIAN AZHARI KURNIAWAN

C.100.130.035


Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal: 07 Agustus 2018

Dewan Penguji:

1. Nuswardhani, S.H., S.U
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono. S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H
NIK. 517 / NIDN. 0727085803

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI ILMIAH

Bismillahirrahmaanirrohlim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya

Nama : ARDIAN AZHARI KURNIAWAN
NIM : C100130035
Fakultas/Jurusan : HUKUM
Jenis : Skripsi
Judul Skripsi : PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN
KERJASAMA PENYERTAAN MODAL DAN
PERJANJIAN KREDIT(studi kasusa putusan
no.284/Pdt.G/PN.SKT)

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk :

1. Memberikan hak saya bebas royalti kepada Perpustakaan UMS atau penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan, serta menampilkannya dalam bentuk *softcopy* untuk kepentingan akademis kepada perpustakaan UMS, tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta.
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UMS, dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya

Surakarta, 25 September 2018

Yang menyatakan



ARDIUAN AZHARI K

PENYELESAIAN PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERJANJIAN KERJA SAMA PENYERTAAN MODAL DAN PERJANJIAN KREDIT

Abstrak

Tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut; a) Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit; b) Untuk mendeskripsikan hakim dalam menentukan putusan atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit yang telah terbukti. Hasil Penelitian Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn diantaranya; a) bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V telah melakukan perubahan Pengurus PT. Wahana Sejahtera dengan melanggar kaidah-kaidah hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 105 jo Pasal 119 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; b) melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Perjanjian Kredit Nomor : 113 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dra. JULI ASTUTI MR. SH. M.Kn. Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar yang mengatur bahwa : "Penerima Kredit sebelum kredit ini dilunasi tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis dari Bank untuk merubah Anggaran Dasar dan Pengurus Perusahaan.

Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Kredit, Perbuatan Melawan Hukum

Abstract

Settlement of Case Against Law in Cooperation Agreement of Equity Participation and Credit Agreement (Case Study in Surakarta District Court)". University of Muhammadiyah Surakarta, Faculty of Law 2018. Research objectives in the problems to be studied are as follows; a) To explain the judge's consideration in determining the proof of a case of unlawful act in a capital investment cooperation agreement and a credit agreement; b) To describe judges in determining decisions on cases of unlawful acts in cooperative equity participation agreements and credit agreements. Result of Research of Decision Number 284 / Pdt. G / 2016 / Pn among others; a) that Defendant II, Defendant III, Defendant IV and Defendant V have made changes to the Board of PT. Wahana Sejahtera by violating the rules of Limited Liability Company as regulated in Article 105 in conjunction with Article 119 of Law no. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company; b) violates the provisions of Article 10 paragraph (1) letter c of Credit Agreement Number: 113 dated 29 July 2013 made by Notary Dra. JULY ASTUTI MR. SH. M. Kn. Notary / PPAT in Karanganyar Regency stipulating that: "Credit Recipient before this credit is paid is not permitted without written approval from the Bank to amend the Articles of Association and Management of the Company.

Keywords: *Agreement, Credit Agreement, Unlawful Actions*

1. Pendahuluan

Meningkatnya persaingan dalam usaha, menimbulkan banyak pelaku usaha saling bersaing satu sama lain. Selain itu para pelaku usaha juga bersaing mengembangkan perusahaannya secara kompetitif maupun saling bekerja sama demi mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, kerja sama yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis pun semakin memegang peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha dan mencapai hasil yang diharapkan.

Perjanjian dan pelaksanaan asas-asasnya merupakan hal yang sangat penting jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diharapkan dalam pelaksanaan perjanjian yang dapat merugikan salah satu pihak baik produsen maupun konsumen. Menurut R. Subekti, perjanjian diartikan sebagai suatu peristiwa dimana ada seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan “perikatan”. Oleh karena itu perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya.¹

Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih. Perjanjian ini menimbulkan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara sebagian inti definisi yang tercantum dalam *Black’s Law Dictionary* adalah bahwa kontrak dilihat sebagai persetujuan dari para pihak untuk melaksanakan kewajiban, baik untuk melakukan atau tidak melakukan secara sebagian.²

Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak jarang terjadi sengketa bahkan tidak sedikit yang sampai ke ranah peradilan akibat upaya damai yang gagal dilaksanakan para pihak yang sedang bersengketa. Bentuk-bentuk sengketa yang dapat timbul dari sebuah perjanjian adalah wanprestasi dan juga perbuatan melawan hukum.

¹R. Subekti, 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm. 22

² Herniwati, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerduta terhadap Jual Beli secara Online (E-Commerce)”, *Jurnal Ipteks Terapan (Research of Applied Science and Education)*, V8.i4, (2015), hlm. 177

Kasus ini adalah gugatan perbuatan melawan antara penggugat dan tergugat. Dalam hal ini penggugat adalah Ir. Widihardjo Spesialis I Psda melawan tergugat yakni di antaranya adalah PT. Bank Tabungan Negara Kantor Cabang Surakarta sebagai tergugat I dan Komari yakni Direktur Utama PT Wahana Sejahtera sebagai tergugat II. Dalam sengketa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surakarta ini, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit yang dibuatnya dengan tergugat.

Pada awal Tahun 2013 PT. Wahana Sejahtera dengan Direktur Utamanya Tergugat II, memenangkan banyak proyek yang terkait dengan PLN, dimana proyek tersebut perlu pendanaan awal yang akan diperoleh dari Pinjaman Bank, dengan syarat ada agunan dan agunan tersebut harus atas nama pengurus perusahaan. Untuk keperluan tersebut, berdasarkan RUPS luar biasa PT Wahana Sejahtera tanggal 20 Februari 2013, penggugat telah diangkat untuk menduduki jabatan komisaris PT. Wahana Sejahtera. Selanjutnya pada tanggal 31 Mei 2013 antara Penggugat dengan Tergugat II selaku Direktur Utama PT. Wahana Sejahtera mengadakan perjanjian kerja sama penyertaan modal dimana keduanya telah sepakat melakukan kerja sama saling menguntungkan dalam mengerjakan proyek-proyek yang berkaitan dengan PLN.

Penggugat selaku investor menyediakan uang dari kepemilikan harta kekayaan milik penggugat yang diagunkan di Bank Tabungan Negara berupa 2 bidang tanah yaitu Hak atas tanah dengan SHM No. 4899 seluas $\pm 173\text{m}^2$ dan Hak atas tanah dengan SHM No. 13510 seluas $\pm 89\text{m}^2$. Selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013, tergugat II dan penggugat selaku komisaris mengadakan perjanjian kredit dengan tergugat I yakni PT. Bank Tabungan Negara. Bahwa di dalam akta perjanjian kredit, disebutkan bahwa tergugat II tidak diperkenankan merubah anggaran dasar dan pengurus PT Wahana Sejahtera sebelum pelunasan kredit kepada Tergugat I. Untuk keperluan tersebut, penggugat bersama tergugat II membuka rekening bersama pada Bank Tabungan Negara dimaksud untuk menerima SI uang pembayaran atau termin proyek terkait untuk pelunasan hutang dan sebagai alat kontrol perjanjian kredit.

Kenyataannya, Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai komisaris secara melawan hukum oleh tergugat II. Dan tergugat II bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan tergugat I telah merubah specimen atau contoh tanda tangan kuasa rekening giro PT. Wahana Sejahtera tanpa sepengetahuan penggugat. Kemudian tanggal 10 Desember 2013, tergugat II bersama sama atau sendiri sendiri dengan tergugat I merubah specimen pada rekening giro dimana semula yang menanda tangani adalah tergugat II bersama penggugat, dirubah dengan yang diberi kuasa oleh tergugat II adalah tergugat II, III, IV tanpa sepengetahuan penggugat. Dan PT Bank Tabungan Negara menyetujui perubahan specimen awal dan perubahan pengurus tersebut tanpa persetujuan penggugat sehingga perjanjian kredit tanggal 29 Juli 2013 menjadi batal demi hukum. Selanjutnya tergugat II melakukan pencairan kembali dan perpanjangan kredit dengan tergugat I dengan agunan atas tanah-tanah milik penggugat tanpa minta persetujuan penggugat. Oleh karena itu hal ini adalah perbuatan melawan hukum.

Petitum penggugat minta agar perjanjian kredit tanggal 29 Juli 2013 dinyatakan batal demi hukum selain itu meminta agar Tergugat I, II, III, IV, V menyerahkan kembali sertifikat HM No. 4899 dan HM No. 13510 dan membayar kerugian materiil atas pembayaran fee bagi hasil yang belum diberikan kepada penggugat sebesar Rp. 9.591.000.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.³ Mariam Darus Badruzaman menjelaskan sebagai berikut:

1. Suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahan atau kelalaiannya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

³ R. Subekti dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, hlm. 346

2. Melanggar hukum adalah tiap perbuatan yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kepatutan yang harus diindahkan dalam pergaulan kemasyarakatan terhadap pribadi atau harta benda orang lain.
3. Seorang yang sengaja tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukannya, disamakan dengan seorang yang melakukan suatu perbuatan terlarang dan karenanya melanggar hukum.

Perbuatan tergugat tersebut, telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat, yang dimintakan dalam petitum untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 30.000.000,- atas biaya pengurusan IMB atas SHM No. 4899 dan juga kerugian immateriil kepada penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat adalah melanggar asas kepatutan sebab perubahan perjanjian kredit dan specimen dilakukan para tergugat tanpa sepengetahuan penggugat dengan agunan milik penggugat dan menimbulkan kerugian materiil yang besar bagi penggugat. Kemudian penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*), yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau dinamakan penelitian hukum kepustakaan.⁴ Dalam penelitian ini digunakan pendekatan aspek-aspek hukum, asas dan kaidah hukum mengenai perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit. Putusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif⁵, merupakan penelitian secara mendalam mengenai individu atau unit sosial dengan menemukan semua variabel penting.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.

⁵ Soerjono dan Abdul Rahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 23

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Data. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat berupa norma, asas, kaidah-kaidah, atau peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; c) Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt. Bahan Hukum Sekunder, berupa penunjang yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang dapat berupa literatur-literatur, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, KBBI, dan lain-lain.

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka. Studi pustaka adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan, dengan cara mempelajari data baik berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam hal ini adalah dalam Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKT.

Analisa data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.⁶ Data-data yang diperoleh dari studi pustaka dianalisis secara kualitatif dan diperhubungkan antara bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum dipadukan dengan pendapat responden di lapangan. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dari permasalahan yang ada yakni terkait perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit dalam Putusan No. 284/Pdt.G/2016/PN.SKt.

⁶Jhonny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, hlm. 242

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit

Berdasarkan pada Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn mengenai proses penyelesaian perkara perjanjian kerja sama atas penyertaan modal dan perjanjian kredit, hakim dalam menentukan pembuktian harus memperhatikan alasan para pihak dan dasar gugatan beserta peraturan yang berlaku.⁷

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 25 Ayat (2) peradilan umum merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸

Tahap awal dalam proses persidangan dimulai dengan pengajuan gugatan oleh penggugat diajukan kepada Pengadilan Negeri Surakarta dalam bentuk tertulis. setelah gugatan didaftarkan, kemudian akan dibuat surat panggilan kepada para pihak untuk menghadiri persidangan.⁹

Tahap pendahuluan merupakan tahap persiapan untuk melaksanakan persidangan, hakim melalui surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, ditunjuk sebagai anggota majelis hakim yang akan mengadili perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit antara Ir. Widiharjo (Penggugat) melawan PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surakart, Komari, RR. Retno Widiastuti, Ignatius Handaya, Sumaryata (Tergugat I, II, II, IV, V).¹⁰

Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadiliperkara tersebut, menerima gugatan dan mempelajari gugatan untuk mengetahui peristiwa hukum yang dihadapi oleh Penggugat, sehingga majelis hakim menetapkan hari sidang.

⁷ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁸ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

⁹ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

¹⁰ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

Pada sidang pertama adalah pemeriksaan terhadap gugatan mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit. pada sidang pertama ini baik Penggugat maupun Tergugat hadir dalam persidangan, akan tetapi dalam Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn Tergugat II,III dan IV tidak hadir ataupun diwakilkan oleh kuasa hukumnya walaupun hakim sudah memanggil dengan cara yang sah dan patut. ketidakhadiran pihak Tergugat II, III, IV dalam persidangan tidak berdasarkan oleh halangan yang sah.¹¹

Proses persidangan dimulai dengan Penggugat membacakan gugatan dan kemudian akan dijawab oleh Tergugat dengan mengajukan peristiwanya dalam jawaban. Isi Gugatan yang diajukan Penggugat diantaranya adalah: Tergugat II bersama-sama dan atau sendiri-sendiri dengan Tergugat I, mengadakan perubahan Specimen pada rekening giro No. 01039.01.30.0000059, dimana semula yang menandatangani adalah Tergugat II bersama Insinyur Widihardjo (PENGGUGAT,yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk menandatangani untuk dan atas nama PT Wahana Sejahtera) dirubah dengan yang diberi kuasa oleh Tergugat II atau yang menandatangani Rekening Giro Bank Tabungan Negara Cabang Surakarta No. 01039.01.30.0000059 adalah Tergugat II, III, IV tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan PT. Bank Tabungan Negara,Tbk (Persero) menyetujui perubahan specimen awal dan Perubahan Pengurus tersebut tanpa persetujuan PENGGUGAT.

Penggugat dalam isi gugatan juga mengajukan alat bukti, diantaranya: Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. WAHANA SEJAHTERA No.86 yang dibuat dihadapan Notaris BAMBANG PRIHANDOKO; Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh RADEN RORO RETNO WIDIASTUTI; Sertifikat Hak Milik No.4899 atas nama pemegang Hak Insinyur Widihardjo; Sertifikat Hak Milik No.13510 atas nama pemegang Hak Insinyur Widihardjo suami Nyonya Sri Hartati Handayani Sarwoasih; Surat Perjanjian Kredit Nomor

¹¹ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

: 113 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. JULI ASTUTI MR, SH. MKn; Surat PT. WAHANA SEJAHTERA Nomor 146/WS.PST/XII/2013, Perihal : Pemberitahuan, yang ditanda tangani oleh KOMARI (Komisaris); Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.WAHANA SEJAHTERA no.02 yang dibuat dihadapan Notaris KHAIRIL ANWAR, SH; Surat Notulen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. WAHANA SEJAHTER; Cetakan Asli dari Google Drive, rincian komunikasi melalui Short Massag Servis (SMS); Cetakan Asli dari Google Drive, rincian komunikasi melalui Short Massage Servis (SMS) dengan Bank BTN Solo; Surat Salinan Rekening Koran No.00031.01.12-000669-2 PT. WAHANA SEJAHTERA Periode 29 Juli 2013 s/d 11 Desember 2014 dari PT. Bank Tabungan Negara Cabang 00031 SOLO; Surat Undangan Pertemuan Nomor 582/SLO.II/HCLU/IV/2015, dari Bank Tabungan Negara kepada PT.WAHANA SEJAHTERA; pemasangan tulisan yang ditempel dirumah Penggugat oleh Bank BTN yang berbunyi : “Tanah & Bangunan ini akan diproses LELANG/JUAL; Specimen / Kartu Contoh Tanda Tangan PT. WAHANA SEJAHTERA; Foto copy pemasangan Pengumuman Lelang dari Bank BTN yang ditempelkan dirumah Penggugat; Foto copy Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang Jaminan dan Pengosongan Agunan Nomor 372/SLO.II/AMD/IV/2017 dari Bank Tabungan Negara kepada PT. WAHANA SEJAHTERA.

Gugatan Penggugat juga berisi mengenai keterangan saksi yang menyatakan diantaranya: Bahwa saksi kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu keluar bekerja dari PT. Wahana Sejahtera, tepatnya sejak tanggal 22 Mei 2014 karena mengundurkan Diri dan Bahwa saksi mengetahui ketika rapat pergantian pengurus tersebut Pak Widiharjo tidak hadir dan anehnya notulen hasil rapat tanggal 20 Nopember 2013 yang membahas penggantian agunan tersebut dituangkan dalam Akta Notaris tertanggal 05 Desember 2013 isinya menjadi Merubah Susunan Anggota Direksi Dan Komisaris.¹²

¹² Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

Pada isi gugatan yang diajukan oleh Penggugat, juga memuat keterangan yang diajukan oleh saksi ahli, isi keterangannya berupa; Bahwa perubahan pengurus tersebut harus mengajukan permohonan mendapatkan persetujuan dari Bank, kalau Bank tidak setuju tidak boleh melakukan perubahan apabila prosedur atau proses melalui permohonan tersebut tidak dilakukan maka ini merupakan pelanggaran perjanjian.

Dasar dari pelanggaran perjanjian yang dijelaskan oleh keterangan saksi ahli adalah; Bahwa untuk penggantian fungsionaris sebelum dilaksanakannya rapat, yang harus dilakukan pertama kali dalam penggantian fungsionaris suatu perusahaan adalah disampaikannya undangan, dan harus dihadiri setidaknya dihadiri oleh 1/2 atau 2/3 pemegang saham. Bahwa apabila fungsionaris ada yang diganti tidak hadir maka kepada yang diganti tersebut diberi kesempatan selama 2 (dua) hari untuk melakukan pembelaan apabila tidak puas terhadap penggantian tersebut dan apabila tidak dilaksanakan maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut sah tetapi substansinya atau putusannya tidak sah apabila tidak memenuhi ketentuan konsekwensinya tidak sah semua dan tidak dapat dipergunakan melakukan perbuatan hukum.¹³

Pada Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn mengenai proses penyelesaian perkara perjanjian kerja sama atas penyertaan modal dan perjanjian kredit, pihak Tergugat I mengajukan eksepsi, diantaranya: Bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan Perbuatan Melawan Hukum diantaranya apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang menjadi dasar hukum atas suatu hal sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPdata, Perbuatan Melawan Hukum dapat lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Bahwa dengan adanya perubahan pengurus PT. Wahana Sejahtera, maka Perjanjian Kredit No.113 tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh

¹³ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

Notaris Juli Astuti MR, SH. Notaris/PPAT di Kabupaten Karanganyar, batal demi hukum adalah tidak benar dan tidak berdasar.¹⁴

Pada dasarnya, kekuatan dari alat-alat bukti tersebut didasarkan kepada urutannya artinya alat bukti yang pertama sebagai alat bukti yang kekuatannya lebih tinggi dibandingkan dengan alat bukti di bawahnya. Setelah dibuktikan, maka hakim menetapkan atau mengkonstatasi peristiwa konkritnya dan sekaligus dirumuskan bahwa peristiwa yang disengketakan tersebut, benar-benar telah terjadi.¹⁵

Salah satu pihak mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan. hakim, untuk membagi beban pembuktian antara penggugat atau tergugat yang harus membuktikan. Dalam hal ini, penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya.¹⁶

Berdasarkan pertimbangan hakim dengan mendengar kesaksian para pihak, baik Penggugat dan Tergugat (eksepsinya) . maka dalam Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn mengenai proses penyelesaian perkara perjanjian kerja sama atas penyertaan modal dan perjanjian kredit, maka pihak Tergugat merugikan Penggugat atau melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. ¹⁷

Hakim juga menyampaikan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, karenanya Petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan.¹⁸

¹⁴ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

¹⁵ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

¹⁶ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

¹⁷ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

¹⁸ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

B. Hakim dalam menentukan putusan atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit yang telah terbukti

Tahap penentuan diakhiri dengan menjatuhkan putusan. Dalam tahap penentuan ini ditentukan nasib para pihak, apakah dimenangkan atau dikalahkan. Apabila gugatan diterima seluruhnya atau sebagian maka penggugat dimenangkan, sebaliknya apabila gugatan ditolak seluruhnya atau sebagian, maka tergugat yang dimenangkan.¹⁹

Sebelum mengambil keputusan sesudah pemeriksaan, majelis hakim harus terlebih dahulu mengadakan siding musyawarah. Dalam sidang ini, para hakim membicarakan dan menyusun putusannya yang akan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.²⁰

Kegiatan hakim dalam proses peradilan perdata adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara yang diajukan kepadanya. Tugas hakim untuk menyelesaikan perkara yang dihadapi oleh pencari keadilan dilakukan melalui kegiatan mengkonstatasi peristiwa konkrit, menyeleksi atau mengidentifikasi peraturan yang menguasai peristiwa konkrit, meng kualifikasi peristiwa konkrit itu menjadi peristiwa hukum, mencari pemecahannya dengan memperhatikan *idée des rechts*, memutuskan siapa yang berhak dan memberi hukumnya dalam bentuk putusan. Selanjutnya mengawasi pelaksanaan putusan sehingga tidak menimbulkan masalah hukum yang baru.²¹

Penemuan hukum merupakan proses atau rangkaian kegiatan yang bersifat kompleks dari pemeriksaan perkara. Kegiatan pemeriksaan perkara dimulai sejak proses jawab menjawab sampai dijatuhkannya putusan. Dari proses jawab menjawab, hakim mengetahui peristiwa yang sekiranya menjadi

¹⁹ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

²⁰ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

²¹ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

sengketa. Kemudian hakim harus memperoleh kepastian tentang sengketa atau peristiwa konkret yang telah terjadi.²²

Pada Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn mengenai proses penyelesaian perkara perjanjian kerja sama atas penyertaan modal dan perjanjian kredit dalam gugatan Penggugat Tergugat I setelah mengetahui adanya perubahan Pengurus PT. Wahana Sejahtera dan menyetujui diadakan perubahan specimen pada Rekening Giro No.01039.01.30.0000059 yang semula ditanda tangani oleh Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat, kemudian dirubah yang menandatangani Rekening Giro tersebut adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat, maka seharusnya Tergugat I berkewajiban menyampaikan pada Penggugat dan pengurus yang baru berkaitan dengan jaminan yang diberikan oleh Penggugat untuk dirubah atau diganti dengan obyek jaminan yang lain, sehingga tidak merugikan Penggugat atau melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V.²³

Hakim menimbang, sesuai pertimbangan-pertimbangan sebagaimana didasarkan atas bukti-bukti surat Penggugat dan Tergugat I dan keterangan Saksi serta Ahli yang diajukan Penggugat, maka menurut Majelis Hakim Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, karenanya Petitum gugatan Penggugat angka 2.²⁴

Berdasarkan keterangan yang diajukan oleh Penggugat beserta saksi dan saksi ahli maka hakim dalam Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn mengenai proses penyelesaian perkara perjanjian kerja sama atas penyertaan modal dan perjanjian kredit menyatakan bahwa Tergugat I, II, III, IV, dan V bersalah atas

²² Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

²³ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

²⁴ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

karena telah melanggar ketentuan perjanjian dengan Penggugat dan melakukan perbuatan melawan hukum mengubah *specimen* Penggugat.²⁵

Hakim menghukum Tergugat I, II, II, IV, dan V diantaranya: menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar; Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kepada Penggugat; Membayar kerugian Materiil atas pembayaran fee/bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.9.591.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); Membayar gaji Komisaris kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 29 Julin 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013; Membayar ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pengurusan IMB atas SHM Nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta; Membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.234.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).²⁶

3. PENUTUP

3.1.Kesimpulan

A. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn Penggugat dalam gugatannya diantaranya adalah:

- 1) Tergugat II bersama-sama dan atau sendiri-sendiri dengan Tergugat I, mengadakan perubahan Specimen pada rekening giro No. 01039.01.30.0000059, dimana semula yang menandatangani adalah Tergugat II bersama Insinyur Widihardjo (PENGGUGAT, yang diberi kuasa oleh Tergugat II untuk menandatangani untuk dan atas nama PT Wahana Sejahtera) dirubah dengan yang diberi kuasa oleh Tergugat II atau yang menandatangani Rekening Giro Bank Tabungan Negara

²⁵ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

²⁶ Sri Widiyastuti, Hakim PN Surakarta, *Wawancara*, February 2018 Pukul 10.00 Wib.

Cabang Surakarta No. 01039.01.30.0000059 adalah Tergugat II, III, IV tanpa sepengetahuan PENGGUGAT dan PT. Bank Tabungan Negara,Tbk (Persero) menyetujui perubahan specimen awal dan Perubahan Pengurus tersebut tanpa persetujuan PENGGUGAT.

- 2) Eksepsi dari Tergugat atas gugatan Penggugat bahwa perubahan pengurus PT.Wahana Sejahtera tidak berakibat batal demi hukumnya Akta Perjanjian Kredit No.113 tanggal 29 Juli 2013, yang dibuat oleh Notaris Juli Astuti MR. SH. Notaris/PPAT di Karanganyar karena hal tersebut termasuk dalam perbuatan Wanprestasi PT. Wahana Sejahtera terhadap Tergugat I, dan hal tersebut tidak membatalkan perjanjian hutang piutang Berdasarkan pertimbangan hakim dengan mendengar kesaksian para pihak, baik Penggugat dan Tergugat (eksepsinya).
 - 3) Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn mengenai proses penyelesaian perkara perjanjian kerja sama atas penyertaan modal dan perjanjian kredit, maka pihak Tergugat merugikan Penggugat atau melanggar hak-hak subyektif Penggugat yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V. Hakim juga menyampaikan Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, karenanya Petitum gugatan Penggugat angka 2 haruslah dinyatakan dapat dikabulkan
- B. Hakim dalam menentukan putusan atas perkara perbuatan melawan hukum dalam perjanjian kerja sama penyertaan modal dan perjanjian kredit yang telah terbukti Putusan Nomor 284/Pdt.G/2016/Pn diantaranya:
- 1) Tergugat I setelah mengetahui adanya perubahan Pengurus PT. Wahana Sejahtera dan menyetujui diadakan perubahan specimen pada Rekening Giro No.01039.01.30.0000059 oleh Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat, kemudian dirubah yang menandatangani Rekening Giro

tersebut adalah Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan atau persetujuan Penggugat;

- 2) perubahan Pengurus PT. Wahana Sejahtera dengan melanggar kaidah-kaidah hukum Perseroan Terbatas yang diatur dalam Pasal 105 jo Pasal 119 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dan telah pula melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c Perjanjian Kredit Nomor : 113 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dra. JULI ASTUTI MR. SH. M.Kn.
- 3) Menyatakan Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum, batalnya Perjanjian Kredit Nomor 113 tanggal 29 Juli 2013 yang dibuat oleh Notaris Dra. JULI ASTUTI MR. SH. M.Kn.
- 4) Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik Nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 13510, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, kepada Penggugat.
- 5) membayar kerugian Materiil atas pembayaran fee/bagi hasil yang belum diberikan kepada Penggugat sebesar Rp.9.591.000,00 (sembilan juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 29 Juli 2013, membayar gaji Komisaris kepada Penggugat sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta limaratus ribu rupiah) setiap bulannya sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013, membayar ganti rugi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pengurusan IMB atas SHM Nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp.2.234.000,00 (dua juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

3.2.Saran

1. Diharapkan kedepannya perjanjian kredit yang diterapkan oleh bank tidak menimbulkan konsumen bagi para debitur, dalam hal ini mengenai syarat

khusus dalam perjanjian bahwa selama perjanjian kredit berlangsung tidak boleh diadakan perubahan struktur organisasi suatu perusahaan. Hal ini sangat merugikan dikarenakan kondisi tiap perusahaan bersifat fluktuatif, bukan statis.

2. Diharapkan kedepannya notaris dalam melakukan profesinya memperhatikan setiap aspek hukum yang terjadi, agar tidak menimbulkan sengketa oleh para pihak.
3. Diharapkan regulasi mengenai perjanjian kredit dilakukan pembaharuan oleh lembaga legislatif dan eksekutif dengan menghapus syarat khusus yang memberatkan debitur.

Daftar Pustaka

Buku

- Ibrahim, Jhonny 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono dan Rahman, Abdul, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Subekti, R., 1996, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita

Jurnal

- Herniwati, “Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata terhadap Jual Beli secara Online (E-Commerce), *Jurnal Ipteks Terapan (Research of Applied Science and Education)*, V8.i4, (2015)

Undang-Undang

KUHPerdata

HIR

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan